



Universitas Katolik Parahyangan
Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik
Program Studi Ilmu Hubungan Internasional

Terakreditasi A

SK BAN-PT No: 451/SK/BAN-PT/Akred/S/XI/2014

Pengaruh *International Campaign to Abolish Nuclear Weapons* pada Proses Negosiasi dalam Mewujudkan *Treaty on the Prohibition of Nuclear Weapons*

Skripsi

Oleh

Satria Yuma

2015330066

Bandung

2018



Universitas Katolik Parahyangan
Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik
Program Studi Ilmu Hubungan Internasional

Terakreditasi A

SK BAN-PT No: 451/SK/BAN-PT/Akred/S/XI/2014

Pengaruh *International Campaign to Abolish Nuclear Weapons* pada Proses Negosiasi dalam Mewujudkan *Treaty on the Prohibition of Nuclear Weapons*

Skripsi

Oleh

Satria Yuma

2015330066

Pembimbing

Sylvia Yazid, Ph.D

Bandung

2018

Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik
Program Studi Ilmu Hubungan Internasional



Tanda Pengesahan Skripsi

Nama : Satria Yuma
Nomor Pokok : 2015330066
Judul : Pengaruh *International Campaign to Abolish Nuclear Weapons* pada
Proses Negosiasi dalam Mewujudkan *Treaty on the Prohibition of
Nuclear Weapons*

Telah diuji dalam Ujian Sidang jenjang Sarjana
Pada Senin, 17 Desember 2018
Dan dinyatakan **LULUS**

Tim Penguji

Ketua sidang merangkap anggota
Elisabeth A. Satya Dewi, Ph.D.

: 

Sekretaris

Sylvia Yazid, MPPM., Ph.D.

: 

Anggota

Adrianus Harsawaskita, S.IP., M.A.

: 

Mengesahkan,
Dekan Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik



Dr. Pius Sugeng Prasetyo, M.Si

SURAT PERNYATAAN



Saya yang bertandatangan di bawah ini:

Nama : Satria Yuma

NPM : 2015330066

Jurusan/Program Studi : Ilmu Hubungan Internasional

Judul : Pengaruh *International Campaign to Abolish Nuclear Weapons* pada Proses Negosiasi dalam Mewujudkan *Treaty on the Prohibition of Nuclear Weapons*

Dengan ini menyatakan bahwa skripsi ini merupakan hasil karya tulis ilmiah sendiri dan bukanlah merupakan karya yang pernah diajukan untuk memperoleh gelar akademik oleh pihak lain. Adapun karya atau pendapat pihak lain yang dikutip, ditulis sesuai dengan kaidah penulisan ilmiah yang berlaku.

Pernyataan ini Saya buat dengan penuh tanggung jawab dan bersedia menerima konsekuensi apa pun sesuai aturan yang berlaku apabila di kemudian hari diketahui bahwa pernyataan ini tidak benar.

Bandung, 17 Januari 2019



Satria Yuma

ABSTRAK

Nama : Satria Yuma

NPM : 2015330066

Judul : Pengaruh *International Campaign to Abolish Nuclear Weapons* pada Proses Negosiasi dalam Mewujudkan *Treaty on the Prohibition of Nuclear Weapons*

Disahkannya *Treaty on the prohibition of nuclear weapon* (TPNW) pada tahun 2017, merupakan sebuah babak baru dalam upaya pelucutan dan pemusnahan senjata nuklir. Hal ini dikarenakan TPNW merupakan sebuah langkah nyata pertama dalam upaya pelucutan dan pemusnahan senjata nuklir sejak di resmikannya *Treaty on the Non-Proliferation of Nuclear Weapons* (NPT) pada 1968, yang melarang penyebaran senjata nuklir. Perubahan fokus isu dari keamanan kepada isu kemanusiaan menjadi salah satu kunci progres signifikan dalam upaya pelucutan senjata nuklir. Disahkannya TPNW bukan hanya berkat upaya dari negara-negara peserta, organisasi non-pemerintah juga memiliki andil dalam membantu proses negosiasi dalam terwujudnya TPNW. Salah satu organisasi yang paling vokal adalah *International Campaign to Abolish Nuclear Weapons* (ICAN). Meskipun diakui keterlibatannya, namun belum ditemukan penjelasan spesifik atas signifikansi pengaruh ICAN.

Aspek utama yang diteliti dalam menilai pengaruh ICAN, adalah upaya-upaya dari ICAN pada proses negosiasi dalam terwujudnya TPNW. Dalam hal ini, konsep peran dan fungsi organisasi non-pemerintah serta relasi organisasi non-pemerintah dengan organisasi pemerintah, akan membantu merekognisi keragaman upaya yang dilakukan oleh ICAN. Berdasarkan kerangka analisis dalam menilai pengaruh organisasi non-pemerintah, penilaian terhadap pengaruh ICAN terhadap TPNW mencakup dua aspek yaitu proses negosiasi dan juga hasil akhir (TPNW). Dimana dalam hal ini ICAN telah berupaya untuk mengadakan *issue framing* baik untuk konsumsi publik maupun pemerintah, *agenda setting* dalam berbagai rangkain konferensi internasional dan juga mempengaruhi posisi aktor-aktor kunci dengan menjadi koordinator jaringan masyarakat sipil pada konferensi internasional yang relevan. Selain itu pengaruh ICAN juga dapat dilihat dari bagaimana ICAN telah berhasil mempengaruhi isi dari teks TPNW melalui pengajuan *working paper* pada saat proses negosiasi sedang berlangsung. Penelitian ini kemudian menilai bahwa pengaruh ICAN terhadap TPNW dapat dikategorikan sebagai tinggi berdasarkan kepada kerangka analisis yang digunakan. Hal yang dapat ditekankan disini bukan hanya kategorisasi dari pengaruh tersebut, namun juga keberagaman dari berbagai upaya ICAN dalam mempengaruhi proses negosiasi yang ada.

Kata kunci: TPNW, ICAN, NPT, Liberalisme Institusionalisme.

ABSTRACT

Name : Satria Yuma
Student Number : 2015330066
Title : The Influence of *International Campaign to Abolish Nuclear Weapons* on the Negotiation Process in the Creation of the *Treaty on the Prohibition of Nuclear Weapons*

The adoption of the *Treaty on the prohibition of nuclear weapon* (TPNW) on 2017, was a new stage on the effort of proliferation and abolishment of nuclear weapons. TPNW was the first concrete action that was taken in the effort of non-proliferation and abolishment of nuclear weapons since the adoption of the *Treaty on the Non-Proliferation of Nuclear Weapons* (NPT) in 1968. The shift on understanding from security issue to humanitarian issue was one of the key to the significant progress in the effort of the abolishment of nuclear weapons. TPNW could be achieved due to the efforts of not only the member states of the United Nations, but also the effort from the non-governmental organizations, and one of the most vocal and active organization is International Campaign to Abolish Nuclear Weapons (ICAN). Although the involvement of ICAN was recognized, but there was no clear explanation on how far ICAN influenced TPNW and its negotiation process.

The main point in assessing ICAN's influence is to first understand the effort that has been conducted. Concept of roles and functions of NGOs and it's relation with IGO, would help in acknowledging the variety of efforts that has been conducted, Based on the analytical framework in assessing the influence of NGO, the assessment of ICAN influence on TPNW covered two aspects which are the negotiation process and the result of the negotiations. In this situation, ICAN has conducted issue framing whether for public consumption or for government, agenda setting in many international conferences and also affecting the position of the key actors by acting as the coordinator for civil society network on several international conferences. Other than that, ICAN's influence could also be seen on how ICAN managed to affect the TPNW itself through the submission of working paper during the negotiation process. This research assessed that ICAN's influence on TPNW could be categorized as high influence, based on the analytical framework. The main point of the discovery of this research was not solely based on the categorization, but also through the diversity of efforts that has been conducted by ICAN in affecting the negotiation process.

Keywords: TPNW, ICAN, NPT, Institutional Liberalism.

KATA PENGANTAR

Isu pelucutan senjata nuklir sempat mengalami stagnansi selama kurang lebih 50 tahun, tepatnya sejak disahkan NPT sebagai perjanjian yang melarang penyebaran senjata nuklir. Pada tahun 2017 diresmikan sebuah perjanjian yang untuk pertama kalinya melarang senjata nuklir, yang bernama TPNW. TPNW dapat terwujud, berkat proses negosiasi yang telah berlangsung selama kurang lebih tujuh tahun. Proses negosiasi yang cukup panjang ini kemudian melibatkan aktor-aktor non-negara yang salah satunya adalah ICAN, organisasi yang aktif dalam menyuarakan pelarangan senjata nuklir. Pada tahun 2017, ICAN menerima penghargaan nobel perdamaian atas pengaruhnya dalam mewujudkan TPNW. Menjadi menarik untuk kemudian menganalisis pengaruh dari ICAN pada proses negosiasi dalam mewujudkan TPNW.

Diharapkan penelitian ini dapat membantu memberikan informasi baru yang mendalam, atas pengaruh ICAN pada proses negosiasi dalam terwujudnya TPNW. Karena terbatasnya pembahasan, diharapkan kedepannya dapat ditemukan tulisan dan penelitian lain yang mampu mengeksplorasi topik ini dari sudut pandang lain. Terima kasih kepada pihak-pihak yang telah membantu mewujudkan penelitian dan tulisan ini, mohon maaf bila terdapat kekurangan atau kesalahan.

Bandung, 4 Desember 2018

Satria Yuma

UCAPAN TERIMA KASIH

Proses pengerjaan tulisan ini tidaklah luput dari dukungan, bantuan, usaha, doa, dan semangat dari orang-orang terdekat. Tanpa keterlibatan pihak-pihak tersebut, pengerjaan tulisan ini tidak akan dapat diselesaikan tepat waktu. Maka dari itu, kata-kata terima kasih saya sampaikan kepada:

1. Allah SWT.
2. Kedua Orang Tua saya, yang sampai dengan hari ini terus memberikan dukungan dan doa dengan berbagai cara, serta telah mendidik saya sampai dapat mengenyam pendidikan di tingkat universitas.
3. Rekan-rekan seperjuangan HI Unpar 2015 yang telah membantu proses pendidikan saya selama berkuliah di Unpar. Untuk setiap buku, pesta, cinta yang telah dilalui bersama-sama, semoga dapat diakhir juga bersama-sama dengan dapat lulus maksimal 4 tahun masa perkuliahan.
4. Mba Sylvia Yazid Ph.D. yang telah bersedia menjadi pembimbing saya dan membantu proses pengerjaan tulisan ini agar dapat memberikan hasil yang maksimal.
5. Mba Ratih Indraswari, yang telah memberikan saya kesempatan untuk menimba ilmu, ke tempat yang tidak pernah saya duga akan saya kunjungi di waktu yang begitu muda.
6. Mba Elisabeth A. Satya Dewi yang telah membuat saya semakin yakin untuk berkecimpung di bidang organisasi internasional, dengan memberikan saya kesempatan untuk ikut bekerja pada proyek organisasi non-pemerintah.

7. Seluruh jajaran dosen HI Unpar yang telah membagikan ilmunya di dalam dan diluar waktu perkuliahan. Tanpa bimbingan seluruh jajaran dosen HI Unpar tidak mungkin saya dapat menyelesaikan tulisan ini dengan hasil yang maksimal.
8. Terima Kasih kepada Bapak Muhadi Sugiono yang telah membantu menyempurnakan informasi terkait ICAN dalam pengerjaan skripsi ini.
9. Zabrina, Gugi, Benita, Dita, Putri, Aretta, Shella, Kenken, Halimah, Andita, Sannia, Nindyo yang telah menjadi teman sekaligus rekan kerja di Divisi Penelitian dan Pengembangan HMPSIHI 2016-2018.
10. Terima kasih kepada Eleonora Ancilla yang telah memberikan motivasi dan bantuan yang begitu besar dalam proses pengerjaan skripsi ini.
11. Terima kasih kepada Nindyo Setiawan dan Valentinus Marchelle yang telah banyak membantu selama proses pengerjaan skripsi ini.

Terakhir, Terima kasih kepada

2015330066.

DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR	i
UCAPAN TERIMA KASIH.....	ii
DAFTAR ISI.....	iv
DAFTAR GAMBAR & DIAGRAM.....	vii
DAFTAR TABEL.....	viii
DAFTAR SINGKATAN	ix
BAB 1 PENDAHULUAN	1
1.1. Latar Belakang Masalah.....	1
1.2. Identifikasi Masalah	4
1.2.1. Deskripsi Masalah.....	4
1.2.2. Pembatasan Masalah	7
1.2.3. Perumusan Masalah	8
1.3. Tujuan dan Kegunaan Penelitian	8
1.3.1. Tujuan Penelitian	8
1.3.2. Kegunaan Penelitian.....	9
1.4. Kajian Literatur	9
1.5. Kerangka Pemikiran.....	11
1.6. Metodologi Penelitian	18
1.6.1. Metode Penelitian.....	18
1.6.2. Jenis Penelitian.....	19
1.6.3. Teknik Pengumpulan Data.....	19
1.7. Sistematika Pembahasan	19
BAB II PERKEMBANGAN PERJANJIAN SENJATA NUKLIR SAMPAI DENGAN TERWUJUDNYA TPNW.....	22
2.1. Latar Belakang Terwujudnya NPT	22
2.1.1. Pembahasan Perkembangan Isu Nuklir Melalui NPT Review Conference	24
2.1.2. Munculnya Isu Kemanusiaan pada NPT Review Conference 2010.	25

2.1.3. Peningkatan Kepedulian terhadap Isu Kemanusiaan melalui Penyampaian Pernyataan oleh Negara Peserta pada NPT Review Conference 2015	26
2.2. Conference on the Humanitarian Impact of Nuclear Weapon dan Isu Kemanusiaan sebagai Fokus Baru Dalam Perdebatan Senjata Nuklir.....	27
2.2.1. Babak Baru terkait Pembahasan Senjata Nuklir Pada Konferensi Oslo melalui Penyajian Fakta	28
2.2.2. Munculnya Dorongan untuk Merealisasikan Perjanjian Pelarangan Nuklir pada Konferensi Nayarit	29
2.2.3. Lahirnya Austrian Pledge di Wina sebagai Inisiatif Politik Pertama dalam Rangkaian Tiga Konferensi.....	31
2.3. Proses Terwujudnya TPNW melalui United Nations Conference to Negotiate a Treaty Banning Nuclear Weapons	34
2.4. TPNW sebagai Perjanjian Internasional Pertama dalam Pelarangan Senjata Nuklir.....	37
BAB III ICAN SEBAGAI ORGANISASI PENDUKUNG PELARANGAN SENJATA NUKLIR	40
3.1. Pendirian ICAN sebagai Organisasi Anti-senjata Nuklir.....	40
3.1.1. Latar Belakang ICAN	40
3.2. Kerjasama Organisasi Mitra dan ICAN sebagai Langkah Kampanye Global	42
3.2.1. Organisasi Non-pemerintah yang Bermitra dengan ICAN	43
3.2.2. Keragaman Organisasi Mitra yang Bekerja Sama dengan ICAN....	45
3.2.3. Upaya-upaya yang telah dilakukan Organisasi Mitra bersama ICAN.	48
3.3. Inisiatif Kemanusiaan sebagai Fokus Utama Baru ICAN dalam Isu Persenjataan Nuklir.....	49
3.4. Dukungan dari Tokoh-tokoh Internasional dan Nobel Perdamaian sebagai Salah Satu Pencapaian Tertinggi ICAN	52
BAB IV PENGARUH ICAN DALAM PROSES NEGOSIASI TPNW	55
4.1. Perubahan Pemahaman Upaya Pelucutan Senjata Nuklir dari Isu Keamanan menjadi Isu Kemanusiaan.....	56
4.1.1. Perubahan Sudut Pandang dalam Melihat Upaya Pelucutan Senjata Nuklir Melalui Isu Kemanusiaan	58
4.1.2. <i>Issue Framing</i> isu Kemanusiaan oleh ICAN melalui Peningkatan Kesadaran Publik dan Advokasi di Konferensi internasional.....	58

4.2. Munculnya Isu Kemanusiaan dalam Proses Negosiasi Pelucutan Senjata Nuklir	61
4.2.1. Agenda Konferensi Internasional yang Berlandaskan Isu Kemanusiaan	64
4.2.2. <i>Agenda Setting</i> oleh ICAN melalui Pengangkatan Isu Kemanusiaan sebagai Fokus Utama Debat Pelarangan Senjata Nuklir	65
4.2.3. <i>Agenda Setting</i> pada Konferensi Oslo melalui Penyajian Fakta dari Dampak Senjata Nuklir	66
4.2.4. <i>Agenda Setting</i> pada Konferensi Nayarit dengan Mendorong Pembahasan Pelarangan Senjata Nuklir	67
4.2.5. Urgensi Keberadaan Instrument Legal sebagai Fokus <i>Agenda Setting</i> pada Konferensi Wina	68
4.3. Perubahan Posisi Aktor-aktor Kunci selama Proses Negosiasi melalui Desakan Publik	69
4.3.1. Perubahan Posisi Negara Pemilik dan Non-pemilik Senjata Nuklir....	71
4.3.2. Upaya ICAN dalam Mempengaruhi Posisi Aktor Kunci dalam Proses Negosiasi TPNW melalui Komunikasi dan Advokasi di Dalam Negeri .	72
4.4. Pembahasan Isu kemanusiaan dan Pelarangan Senjata Nuklir beserta Proses Pelucutannya dalam TPNW	74
4.4.1. Pembahasan Isu Kemanusiaan secara Spesifik pada TPNW	76
4.4.2. Pembahasan Isu Kemanusiaan dalam TPNW melalui Pengumpulan <i>working paper</i> pada Proses Negosiasi oleh ICAN.....	77
BAB V KESIMPULAN	82
DAFTAR PUSTAKA	85

DAFTAR GAMBAR & DIAGRAM

GAMBAR

3.1. Peta Persebaran Organisasi Non-pemerintah Mitra ICAN

DIAGRAM

3.1. Organisasi Non-pemerintah yang Bermitra dengan ICAN

DAFTAR TABEL

1.1. Indikator Pengaruh Organisasi Non-pemerintah

2.1. Hasil Analisis Berdasarkan Kerangka Analisa Pengaruh Organisasi Non-pemerintah

DAFTAR SINGKATAN

TPNW = *Treaty on the Prohibition of Nuclear Weapons*

PBB = Perserikatan Bangsa-Bangsa

ICAN = *International Campaign to Abolish Nuclear Weapons*

NPT = *Treaty on the Non-Proliferation of Nuclear Weapons*

BAB I

PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang Masalah

Pengembangan senjata berbasis nuklir pertama kali diluncurkan secara resmi oleh Amerika Serikat melalui “*The Manhattan Project*” yang dimulai pada Agustus 1942, dimana program ini bertujuan untuk membuat bom atom pertama di dunia. Dalam perjalanannya, Amerika Serikat hanya membutuhkan waktu tiga tahun untuk melakukan uji coba pertama pada bom nuklirnya, tepatnya pada 16 Juli 1945. Disaat yang bersamaan, uji coba yang berjudul “*trinity*” ini juga merupakan awal dari berkembangnya nuklir secara global.¹ Hanya berselang satu bulan setelah diadakannya uji coba tersebut, untuk pertama kalinya dunia menyaksikan kekuatan ledakan dari bom uranium dan plutonium yang dijatuhkan oleh Amerika Serikat di kota Hiroshima & Nagasaki, Jepang.²

Selama empat dekade setelah kejadian tersebut, negara-negara di dunia mulai mengikuti jejak Amerika Serikat dalam mengembangkan persenjataan nuklir mereka yaitu, Uni Soviet, Britania Raya, Perancis, Kuba, India, Tiongkok, dan juga beberapa negara lainnya. Jika dipandang melalui konteks perdamaian dunia, tragedi pemboman kota Hiroshima dan Nagasaki adalah salah satu faktor perang dunia kedua berhenti, namun disaat yang bersamaan ledakan itupula yang

¹ Terrence R.Fehner & F.S. Gosling (2012). *The Manhattan Project*. United State of America, U.S. government, U.S. Department of Energy

² Nuclear weapons timeline. (n.d.). Retrieved January 03, 2018, from <http://www.icanw.org/the-facts/the-nuclear-age/>

menyebabkan perang dingin yang pada dasarnya bertumpu pada pengembangan senjata nuklir di berbagai belahan dunia.

Perkembangan senjata nuklir mencapai puncaknya pada tahun 1986 dimana total hulu ledak nuklir di seluruh dunia mencapai 64.099 hulu ledak nuklir. Selain mencapai angka tertinggi untuk jumlah hulu ledak nuklir di dunia, pada tahun 1986 juga muncul kesepakatan antara Amerika Serikat dan juga Uni Soviet untuk menghapuskan seluruh misil darat yang dimiliki oleh kedua negara tersebut.³ Meskipun jumlah produksi hulu ledak nuklir dunia terus meningkat pada tahun 80an, sebuah perjanjian yang bernama *Treaty on the Non-Proliferation of Nuclear Weapons (NPT)* lahir setelah terjadinya kesepakatan oleh berbagai pihak di seluruh dunia dan dibuka untuk ditandatangani oleh negara-negara di dunia sejak tahun 1968.

NPT bertujuan untuk mencegah penyebaran senjata nuklir dan juga senjata nuklir yang kemudian diarahkan kepada pemusnahan senjata nuklir secara menyeluruh, dimana disaat yang bersamaan melalui perjanjian ini diupayakan untuk mempromosikan kerjasama antarnegara dalam penggunaan tenaga nuklir untuk tujuan perdamaian yang mulai diberlakukan pada tahun 1970.⁴ Sepanjang akhir tahun 1980an sampai dengan hari ini, jumlah hulu ledak nuklir sudah jauh berkurang namun disaat yang bersamaan justru saat ini lebih banyak negara yang

³ Nuclear Notebook. (n.d.). Retrieved January 03, 2018, from <https://thebulletin.org/nuclear-notebook-multimedia>

⁴ Treaty on the Non-Proliferation of Nuclear Weapons (NPT) – UNODA. (n.d.). Retrieved January 03, 2018, from <https://www.un.org/disarmament/wmd/nuclear/npt/>

memiliki hulu ledak nuklir dimana yaitu adalah Amerika Serikat, Russia, Britania Raya, Perancis, Tiongkok, India, Israel, Pakistan dan Korea Utara.⁵

Keberadaan senjata nuklir di dunia ini menimbulkan berbagai kekhawatiran terutama setelah dunia melihat dampak dari ledakan hulu ledak nuklir di kota Hiroshima dan Nagasaki, sehingga semakin muncul dorongan dari berbagai pihak yang menyuarakan pemusnahan senjata nuklir secara menyeluruh, termasuk juga dorongan dari organisasi-organisasi internasional non-pemerintah. International Campaign to Abolish Nuclear Weapons (ICAN) merupakan salah satu pihak yang aktif dalam menyuarakan pemusnahan senjata nuklir dan hulu ledak nuklir secara menyeluruh. ICAN adalah koalisi dari berbagai organisasi non-pemerintah di lebih dari 100 negara yang mempromosikan ketaatan dan juga implementasi dari perjanjian larangan senjata nuklir Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB).

ICAN pertama kali dicetuskan di Australia namun diluncurkan secara formal di Austria pada April 2007 dan kemudian berpusat di Geneva, Swiss. Pendirian ICAN terinspirasi dari gerakan internasional yang mendorong pemerintah dunia untuk melarang penggunaan ranjau darat. ICAN berfokus kepada dampak dari penggunaan senjata nuklir terhadap manusia. Gerakan-gerakan atau kampanye yang dilakukan oleh ICAN dilakukan melalui berbagai cara dimana yang adalah mengadakan acara untuk meningkatkan kepedulian masyarakat terhadap dampak dari ledakan atau penggunaan senjata nuklir terhadap manusia dan juga ikut

⁵ Nuclear Notebook. (n.d.). Retrieved January 03, 2018, from <https://thebulletin.org/nuclear-notebook-multimedia>

berpartisipasi aktif dalam advokasi di Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) dan juga di skala nasional.⁶

ICAN telah banyak mendapat dukungan dari berbagai pihak termasuk aktor-aktor internasional yang memiliki pengaruh besar seperti pemenang penghargaan nobel antara lain Desmond Tutu, Dalai Lama, Herbie Hancock, Yoko Ono dan masih banyak lagi. Bahkan pada 2012 lalu, Sekjen Perserikatan Bangsa-Bangsa yang kala itu menjabat yaitu Ban Ki Moon memberikan pujian kepada ICAN dengan mengatakan bahwa ICAN telah bekerja dengan penuh komitmen dan juga penuh dengan kreativitas dalam mencapai tujuan bersama dalam memusnahkan senjata nuklir secara menyeluruh.⁷

Pada tahun 2017, ICAN menerima penghargaan nobel perdamaian sebagai sebuah bentuk rekognisi terhadap keterlibatan ICAN dalam terwujudnya TPNW. Penghargaan ini menunjukkan signifikansi pengaruh ICAN dalam proses negosiasi TPNW. Selain itu, ICAN merupakan salah satu organisasi internasional pertama yang secara spesifik mengangkat isu pelarangan senjata nuklir sebagai tujuan utamanya. Hal ini menjadi dasar penentuan ICAN sebagai organisasi yang akan diteliti, meskipun terdapat organisasi lainnya yang ikut terlibat dalam proses negosiasi dalam mewujudkan TPNW, namun pengakuan dunia internasional terhadap ICAN menjadi pembeda.

1.2. Identifikasi Masalah

1.2.1. Deskripsi Masalah

⁶ Campaign overview, (n.d), Retrieved January 03, 2018, from <http://www.icanw.org/campaign/campaign-overview/>

⁷ Campaign overview. (n.d.). Retrieved January 03, 2018, from <http://www.icanw.org/campaign/campaign-overview/>

Pada tanggal 7 Juli 2017 Sidang Umum Perserikatan Bangsa-Bangsa mencapai kesepakatan untuk mengeluarkan resolusi 71/258 yang memutuskan untuk mengadopsi *Treaty of the Prohibition of Nuclear Weapon* (TPNW). TPNW adalah instrumen legal yang bersifat mengikat yang melarang senjata nuklir yang kemudian diarahkan kepada pemusnahan senjata nuklir secara menyeluruh. Perjanjian ini ditandatangani oleh 50 negara anggota Perserikatan Bangsa-Bangsa yang menghadiri sidang umum tersebut termasuk juga beberapa negara yang memiliki program pengembangan nuklir seperti halnya Afrika Selatan.

TPNW dapat terwujud melalui proses yang panjang selama tujuh tahun yang dimulai secara spesifik pada tahun 2010 dan terwujud pada 2017. Salah satu tonggak dimulainya proses negosiasi adalah resolusi Sidang Umum PBB 67/56 berjudul “*Taking forward multilateral nuclear disarmament negotiations*” yang kemudian mengarah kepada pembentukan satuan kerja terbuka yang bertugas untuk mengembangkan proposal untuk mendorong negosiasi multilateral terkait pelucutan senjata nuklir dalam mencapai dunia tanpa keberadaan senjata nuklir. Selain resolusi Sidang Umum PBB 67/56, terdapat pula beberapa resolusi dan juga konferensi yang mengarah kepada pembentukan TPNW, diantaranya adalah resolusi A/RES/71/258 yang diadopsi melalui sidang umum PBB pada 23 Desember 2016, *International Conference on the humanitarian impact of nuclear weapons* yang diselenggarakan di Norwegia, Mexico dan juga Austria pada selang

waktu 2013-2014, resolusi Sidang Umum PBB 70/47, 70/48, 70/50 dan beberapa resolusi dan juga konferensi lainnya.⁸

Inisiatif TPNW dapat terwujud dikarenakan semakin banyaknya pengakuan dari negara-negara dari berbagai belahan dunia dalam meningkatkan kesadaran atas dampak dari penggunaan senjata nuklir terhadap manusia dan juga dampaknya terhadap lingkungan. Hal ini ditunjukkan dengan meningkatnya jumlah konferensi internasional yang membahas isu dampak yang dapat ditimbulkan senjata nuklir terhadap manusia seperti contohnya Konferensi Wina atas dampak dari penggunaan senjata nuklir terhadap manusia yang diselenggarakan pada 8-9 Desember 2014 dan juga resolusi Sidang Umum PBB 67/56 yang menunjukkan kekhawatiran dampak buruk dari segala bentuk penggunaan senjata nuklir terhadap manusia.

Dalam terwujudnya TPNW, selain adanya pengakuan dan juga peran aktif dari negara-negara di dunia terdapat juga keterlibatan dari masyarakat dari berbagai belahan dunia melalui organisasi-organisasi non-pemerintah, baik itu melalui upaya advokasi maupun unjuk rasa untuk meningkatkan kesadaran publik dan sebagai sebuah bentuk dorongan terhadap pemerintah. Salah satu organisasi internasional non-pemerintah yang turut berpartisipasi aktif dalam terwujudnya TPNW adalah ICAN. Peran ICAN dalam memusnahkan nuklir secara menyeluruh bahkan diakui oleh orang-orang terpandang seperti halnya Ban Ki-Moon, mantan Sekretaris Jenderal PBB & juga Dalai Lama pemenang nobel perdamaian. Apa yang dicoba dibawa oleh ICAN kemudian dijelaskan lebih lanjut oleh

⁸ United Nations Conference to Negotiate and Legally Binding Instrument to Prohibit Nuclear Weapons, Leading Towards their Total Elimination, 27 April to 22 May 2015. (n.d.). Retrieved January 03, 2018, from <https://www.un.org/disarmament/ptnw/background.html>

Beatrice Fihn yang merupakan Direktur Eksekutif ICAN, dengan melakukan sebuah pendekatan kemanusiaan yang baru. Hal yang dimaksud oleh Beatrice Fihn disini adalah bekerja dengan menggunakan perspektif kemanusiaan yang pada dasarnya bukanlah hal baru dalam konteks pembahasan senjata nuklir.

Ia menambahkan bahwa dampak terbesar dalam proses mewujudkan TPNW adalah dengan mengangkat isu dampak senjata nuklir terhadap manusia.⁹ Beatrice merasa bahwa selama ini, upaya-upaya pemusnahan senjata nuklir terlalu terfokus kepada upaya untuk membuat ‘negara-negara nuklir’ ikut berpartisipasi dalam pemusnahan senjata nuklir secara menyeluruh. Beatrice melalui ICAN berupaya untuk membawa pendekatan baru dimana tujuan utamanya adalah mewujudkan pemusnahan senjata nuklir secara menyeluruh dengan atau tanpa ‘negara-negara nuklir’ tersebut, sehingga akhirnya terwujudlah TPNW meskipun ‘negara-negara nuklir’ belum menandatangani perjanjian tersebut.

Meskipun keterlibatan dan pengaruh ICAN dalam TPNW telah diakui oleh berbagai pihak termasuk juga penerimaan penghargaan nobel perdamaian pada 2017, namun belum ditemukan studi yang menjelaskan secara spesifik bagaimana ICAN dapat mempengaruhi proses negosiasi dalam mewujudkan TPNW. Oleh karena itu, penelitian ini berupaya meneliti pengaruh yang telah diberikan oleh ICAN selama proses negosiasi dan juga terhadap hasil akhir dari proses negosiasi tersebut yaitu TPNW.

1.2.2. Pembatasan Masalah

⁹ Mekata, Motoko, "How Transnational Civil Society Realized the Ban Treaty: An Interview with Beatrice Fihn," *Journal for Peace and Nuclear Disarmament*, March 13, 2018, 1-14, doi:10.1080/25751654.2018.1441583

Fokus penelitian ini membatasi bahasan masalah berdasarkan upaya ICAN dan juga waktu. Pengaruh ICAN dalam proses terwujudnya TPNW dapat dilihat dari upaya-upaya yang telah dilakukan oleh ICAN baik kepada publik, kepada organisasi mitra ICAN, maupun di konferensi internasional. Namun, dikarenakan banyaknya jumlah upaya yang telah dilakukan oleh ICAN, maka dibutuhkan pembatasan waktu untuk memfokuskan penelitian. Pembatasan waktu akan dimulai pada tahun 2010 ketika pertama kali munculnya isu kemanusiaan, sampai dengan tahun 2017 sebagai tahun disahkannya TPNW. Selain itu proses negosiasi yang diteliti tidak terbatas pada konferensi dalam memformulasikan TPNW, namun lebih kepada akumulasi dari berbagai proses negosiasi sejak 2010 ketika munculnya isu kemanusiaan.

1.2.3. Perumusan Masalah

Selama ini negara merupakan aktor utama yang selalu menjadi tolak ukur kesuksesan sebuah perjanjian, sehingga menjadi menarik ketika sebuah organisasi non-pemerintah mendapat rekognisi atas upayanya dalam mewujudkan TPNW. Rekognisi melalui pemberian penghargaan Nobel perdamaian kepada ICAN, memunculkan pertanyaan atas signifikansi pengaruh ICAN dalam proses negosiasi terwujudnya TPNW, yang kemudian menjadi dasar dari penelitian ini yaitu: **Bagaimana pengaruh International Campaign to Abolish Nuclear Weapon (ICAN) pada proses negosiasi dalam mewujudkan *Treaty of the Prohibition of Nuclear Weapon (TPNW)*?**

1.3. Tujuan dan Kegunaan Penelitian

1.3.1. Tujuan Penelitian

Penelitian bertujuan untuk meneliti dan menilai pengaruh dari ICAN pada proses negosiasi dalam mewujudkan TPNW. Permasalahan ini diteliti dengan menganalisis upaya-upaya yang telah dilakukan oleh ICAN dalam mempengaruhi proses negosiasi dalam mewujudkan TPNW.

1.3.2. Kegunaan Penelitian

Kegunaan dari penelitian ini adalah sebagai sumber informasi baru dalam memahami pengaruh dari ICAN pada proses negosiasi dalam terwujudnya TPNW. Hal ini didasari kepada fakta bahwa sampai dengan tahun 2018, belum ditemukan studi yang secara spesifik membahas pengaruh ICAN pada proses negosiasi dalam terwujudnya TPNW.

1.4. Kajian Literatur

Senjata nuklir yang telah menjadi permasalahan dunia selama beberapa dekade kebelakang terus menjadi permasalahan sampai dengan hari ini. Resolusi yang adapun seakan masih jauh dari jalan untuk menghilangkan senjata nuklir secara keseluruhan. Hal ini juga ditunjukkan oleh Beatrice Fihn melalui tulisannya “A New Humanitarian Era: Prohibiting the Unacceptable” menggambarkan bagaimana pada tahun 2015 lalu pada pertemuan peninjauan NPT, negara yang berkumpul gagal untuk menghasilkan kata sepakat dan pada akhirnya tidak terdapat dokumen revisi. Pada saat ini pula tidak terlihat kekecewaan ataupun rasa terkejut akan kegagalan ini.¹⁰ Hal ini menunjukkan bahwa kegagalan dalam upaya pelucutan dan senjata nuklir sudah menjadi suatu hal yang lumrah.

¹⁰ Beatrice Fihn, ‘A New Humanitarian Era: Prohibiting the Unacceptable’, *Arms Control Today*; Washington Vol. 45, Iss.6 (2015) 19 -22

Namun, John Burroughs melalui tulisannya yang berjudul “*Key Issues in Negotiations for a Nuclear Weapons Treaty: Negotiations and Beyond*” Iss 7 menyebutkan bahwa sekitar sejak bulan Mei 2016 lalu, negara-negara di dunia yang mendukung pemusnahan senjata nuklir secara menyeluruh mulai mendapatkan angin segar setelah tercapainya resolusi Treaty on the Prohibition of Nuclear Weapons (TPNW) pada tahun 2017. Hal ini tidak terlepas dari upaya negara-negara dan juga *civil society* dalam memperjuangkan keinginan mereka agar terwujudnya dunia yang bebas dari senjata nuklir. Pencapaian ini dapat dikatakan cukup luar biasa mengingat proses yang dibutuhkan dalam mewujudkan resolusi ini kurang lebih hanya membutuhkan waktu satu tahun.¹¹

Sebelum terwujudnya perjanjian ini, John Burroughs juga telah membahas terlebih dahulu kerangka yang digunakan yang telah melewati proses negosiasi yang dilakukan oleh para diplomat yang merepresentasikan 130 negara melalui tulisan sebelumnya yaitu “*Key Issues in Negotiations for a Nuclear Weapons Treaty: Negotiations and Beyond*” Iss 5. Draft pembuatan perjanjian ini dirancang pada 22 Mei 2017 yang kemudian berlanjut pada 15 Juli 2017 hingga 7 Juli 2017 untuk dibahas lebih lanjut. Selama proses pembuatan perjanjian ini terutama pada minggu pertama, perwakilan pemerintah dari setiap negara yang hadir bekerja secara beriringan dengan perwakilan-perwakilan masyarakat sipil (Organisasi non-pemerintah).¹²

¹¹ John Burroughs, ‘*Key Issues in Negotiations for a Nuclear Weapons Treaty: Negotiations and Beyond*’, *Arms Control Today*; Washington Vol. 47, Iss. 7 (2017) 12 – 19

¹² John Burroughs, ‘*Key Issues in Negotiations for a Nuclear Weapons Prohibition Treaty*’, *Arms Control Today*; Washington Vol. 47, Iss. 5 (2017) 6 – 13

Melalui ketiga sumber ini, dapat dilihat bagaimana tidak mudahnya perjalanan dalam tercapainya TPNW ini. Proses negosiasi yang membutuhkan waktu kurang lebih satu tahun tidak menggambarkan sebagaimana kompleks dan lamanya upaya yang ada sampai dengan terwujudnya proses negosiasi. Satu hal yang patut untuk didalami dari ketiga bacaan ini adalah adanya pengaruh dari organisasi non-pemerintah dalam proses negosiasi sampai dengan terwujudnya perjanjian ini.

Hal ini dikarenakan dari berbagai pernyataan yang telah disampaikan, tidak ada satupun yang menjelaskan secara detil pengaruh dari keterlibatan organisasi non-pemerintah pada proses negosiasi TPNW. Berdasarkan pemaparan diatas, telah disebutkan adanya organisasi non-pemerintah pada proses negosiasi TPNW, namun tidak ditemukan penjelasan atas signifikansi dari keberadaan organisasi non-pemerintah. Berangkat dari hal tersebut, penelitian ini bertujuan untuk mengisi kekosongan tersebut, dengan meneliti pengaruh dari ICAN sebagai salah satu organisasi non-pemerintah yang paling aktif dan vokal pada proses negosiasi dalam mewujudkan TPNW.

1.5. Kerangka Pemikiran

Dalam penelitian ini, posisi ICAN sebagai sebuah organisasi internasional dijelaskan melalui teori liberalisme institusional, yang menekankan kepada peran dari institusi atau organisasi internasional dalam hubungan internasional.¹³ Dalam teori ini terdapat penjelasan visi dimana keberadaan organisasi internasional dapat merubah tatanan atau hubungan internasional dari yang dijuluki sebagai “*Jungle*” dapat dirubah menjadi “*Zoo*”. Visi yang dimaksud disini adalah bagaimana

¹³ Robert Jackson, and Georg Sorensen. *Introduction to International Relations Theories and Approaches*. Fifth ed. Oxford, UK: Oxford University Press, 2013, 110-113

keberadaan organisasi internasional dapat merubah kondisi hubungan internasional dari yang semula kumpulan kekuatan politik yang tidak teratur dan terkesan kacau-balau menjadi sebuah tatanan internasional internasional yang terregulasi dan juga hubungan yang damai.

Dalam konsep liberalisme institusionalis juga dijelaskan tiga fungsi dari organisasi atau institusi, yaitu :

- Menyediakan informasi dan juga kesempatan untuk bernegosiasi;
- Menambah kemampuan pemerintah dalam memonitor pihak lain dan juga untuk mengimplementasi bentuk komitmennya;
- Memperkuat ekspektasi yang ada terhadap kekukuhan dari perjanjian internasional.

Sebagai sebuah organisasi internasional, ICAN termasuk kedalam kateogri organisasi non pemerintah dikarenakan bentuknya yang independen dan tidak memiliki hubungan dengan pemerintah negara manapun. Sebagai sebuah organisasi non-pemerintah, ICAN menjalankan berbagai macam peran dalam keterlibatannya pada proses negosiasi dalam mewujudkan TPNW. Peran-peran ini lebih lanjut dijelaskan melalui konsep peran NGO yang dikemukakan David Lewis dan Nazneen Kanji secara lebih merincis. Dalam bukunya yang berjudul *“Non-Governmental Organizations and Development”*, Lewis dan Kanji memaparkan secara spesifik peran-peran yang dimiliki oleh sebuah organisasi non-pemerintah. Lewis dan Kanji membagi kepada tiga peran dari sebuah

organisasi non-pemerintah yaitu *service delivery, partnership, catalyst & watchdogs*.¹⁴

Service delivery merupakan peran yang dimiliki oleh sebuah organisasi non-pemerintah dimana organisasi non-pemerintah berperan untuk memberikan bantuan kepada masyarakat terutama di negara berkembang yang masyarakatnya seringkali menghadapi situasi dimana mereka tidak mendapatkan akses terhadap penyediaan jasa mendasar dari negaranya. Secara sederhana pada konsep ini dijelaskan bahwa organisasi non-pemerintah berperan untuk mengisi “kekosongan” yang ditinggalkan oleh pemerintah karena satu dan lain hal.

Dalam pelaksanaannya, organisasi-non-pemerintah memiliki berbagai macam alasan dalam melaksanakan peran ini. Organisasi non-pemerintah dapat menjalankan peran ini melalui permintaan pemerintah dimana mereka “dikontrak” untuk mengambil alih area yang sudah tidak dapat dipegang kembali oleh pemerintah. Pada kenyataannya, tidak semua organisasi non-pemerintah menyediakan jasa kepada masyarakat setempat secara langsung, terdapat juga organisasi non-pemerintah yang memberikan jasa secara tidak langsung seperti contoh melalui pemberian pelatihan kepada organisasi non-pemerintah lain, pemerintah ataupun kepada sektor swasta.

Peran kedua dari sebuah organisasi non-pemerintah yang dijelaskan oleh Lewis & Kanji adalah *catalysis*. Konsep *catalysis* dibagi kembali menjadi dua peran yaitu advokasi dan juga inovasi. Peran advokasi dalam sebuah organisasi non-pemerintah bukanlah hal yang baru, namun baru pada sekitar tahun 1990

¹⁴ David Lewis, and Nazneen Kanji. "NGO Roles in Contemporary Development Practice." In *Non-Governmental Organizations and Development*, 91-119. Abingdon, UK: Routledge, 2009

advokasi dianggap menjadi salah satu peran penting dari sebuah organisasi non-pemerintah. Selain itu, dalam konteks advokasi, organisasi non-pemerintah berperan sebagai "*policy entrepreneurs*" yang bertujuan untuk memberikan pengaruh terhadap pembentukan ataupun perubahan sebuah kebijakan melalui beragam cara yang inovatif demi mencapai tujuannya.

Dalam mengkonsepkan proses pembentukan kebijakan, dijelaskan terdapat tiga tahapan yang dilalui. Pertama adalah penentuan agenda dimana pada tahapan ini ditetapkan prioritas dan juga isu yang dibahas disepakati. Tahapan kedua adalah perkembangan kebijakan, pada tahap ini ditetapkan pilihan alternatif dan juga opsi yang dapat dipilih dalam pembuatan kebijakan ini. Terakhir, setelah melewati dua tahapan tersebut maka tahapan yang tersisa adalah implementasi kebijakan. Dalam implementasi kebijakan ditekankan bagaimana organisasi non-pemerintah berupaya untuk "menerjemahkan" kebijakan yang telah terwujud kedalam realisasi dari kebijakan tersebut. Menurut Najam dalam penjelasannya pada buku "*NGO Roles in Contemporary Development Practice*", pada tahapan manapun organisasi non-pemerintah akan terlihat untuk berupaya mempengaruhi keputusan dan juga pertemuan yang termasuk kedalam proses pembuatan kebijakan tersebut. Selain advokasi, peran yang terdapat pada bagian catalyst adalah inovasi.¹⁵

Selanjutnya, peran yang dapat dimiliki oleh sebuah organisasi non-pemerintah adalah *partnership*. Bermitra merupakan salah satu langkah yang sering diambil oleh sebuah organisasi non-pemerintah dikarenakan berbagai keuntungannya

¹⁵ David Lewis, and Nazneen Kanji. "NGO Roles in Contemporary Development Practice." In *Non-Governmental Organizations and Development*, 91-119. Abingdon, UK: Routledge, 2009

seperti efisiensi penggunaan sumber daya yang ada atau juga meningkatkan stabilitas dari organisasi itu sendiri. Peran *partnership* dibagi menjadi dua yaitu aktif dan juga dependen. Aktif yang dimaksud disini adalah bagaimana sebuah hubungan kemitraan antar organisasi non-pemerintah terbangun dalam sebuah proses negosiasi bukan merupakan rancangan awal. Sedangkan dependen, merupakan sebuah bentuk kerjasama organisasi non-pemerintah yang telah dikonsepsikan dari awal dan memiliki draf yang jelas.

Peran terakhir yang terdapat dalam konsep yang dikemukakan oleh Najam adalah organisasi non-pemerintah sebagai “*watchdogs*”. Peran ini lebih berfokus kepada bagaimana organisasi non-pemerintah menjadi pengawas dalam memperhatikan pengimplementasian kebijakan. Fungsi pengawasan ini dapat memperhatikan jika suatu kebijakan tidak di implementasikan dalam waktu tertentu ataupun jika sebuah kebijakan dieksekusi secara buruk.

Selain melihat peran ICAN, dalam melihat upaya-upaya yang telah dilakukan oleh ICAN maka perlu untuk melihat fungsi yang dijalankan oleh ICAN sebagai sebuah organisasi non-pemerintah seperti yang dijelaskan oleh Margaret P.Karns dan Karen A. Mingst.¹⁶ Karns dan Mingst membagi fungsi organisasi non-pemerintah menjadi Sembilan bagian yaitu mengumpulkan dan mempublikasikan informasi, mengemas isu untuk konsumsi publik, membuat dan memobilisasi jaringan, meningkatkan partisipasi publik, advokasi perubahan di kebijakan dan pemerintahan, mempromosikan norma baru, memonitor hak asasi manusia dan norma-norma lingkungan, berpartisipasi pada konferensi global dan melaksanakan

¹⁶ Margaret P. Karns and Karen A. Mingst, “Nonstate Actors: NGOs, Networks, and Social Movements”, in *International Organizations: The Politics and Processes of Global Governance*, 235. (Boulder, Col.: Lynne Rienner Publ., 2015)

fungsi pemerintah di bidang yang mengalami kekosongan pemerintah. Khusus untuk fungsi berpartisipasi di konferensi global, terdapat tambahan tiga fungsi spesifik dalam partisipasi sebuah organisasi non-pemerintah yaitu mengangkat isu, mengumpulkan *position paper*, dan melobi untuk mengajukan suatu sudut pandang.

Dalam menjalankan peran dan fungsinya, perjalanan ICAN tentu tidak lepas dari Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) sebagai organisasi pemerintah yang menjadi wadah terwujudnya TPNW. Maka dari itu diperlukan pemahaman hubungan antara ICAN dan PBB melalui konsep relasi organisasi pemerintah dan non-pemerintah yang dikemukakan Karns dan Mingst yang membagi bentuk hubungan keduanya kedalam lima bagian yaitu, konsultasi dalam pembuatan dan pengimplementasian perjanjian, melobby, pengawasan aktifitas pemerintah, keterlibatan dalam pengimplementasian program internasional dan berpartisipasi dalam pengambilan keputusan.¹⁷

Dalam menganalisa pengaruh dari ICAN, keberadaan konsep-konsep yang ada membantu merekognisi keragaman dari upaya-upaya yang telah dilakukan oleh ICAN. Hal ini dikarenakan kerangka analisis dalam menilai pengaruh organisasi non-pemerintah yang dikemukakan Elisabeth Corell dan Michele M. Betsill membatasi ruang analisis kepada proses negosiasi saja. Kerangka analisis ini kemudian menjadi tumpuan dalam menjelaskan pengaruh ICAN. Pada kerangka analisa ini dijelaskan bahwa partisipasi sebuah organisasi non-

¹⁷ Margaret P. Karns and Karen A. Mingst, "Nonstate Actors: NGOs, Networks, and Social Movements", in *International Organizations: The Politics and Processes of Global Governance*, 236. (Boulder, Col.: Lynne Rienner Publ., 2015)

pemerintah tidaklah sama dengan pengaruh sebuah organisasi pemerintah.¹⁸ Dijelaskan bahwa pengaruh yang dimaksudkan disini bertumpu kepada dua hal yaitu bagaimana sebuah organisasi non-pemerintah membangun komunikasi dengan aktor yang terlibat sebuah proses negosiasi dan bagaimana perubahan sikap dari aktor tersebut sebagai respon dari komunikasi yang telah terjalin. Dijelaskan juga bahwa dalam kerangka analisa ini, pengaruh sebuah organisasi non-pemerintah tidak akan diukur melainkan dinilai dan dibagi ke dalam tiga

Tabel 1.1. Indikator Pengaruh Organisasi Non-pemerintah

	Influence Indicator	Behavior of other Actors	As cause by NGO Communication	NGO Influence
Influence on Negotiating Process	Issue Framing	How was the issue understood prior to the start of negotiations?	What did NGOs do to bring about this understanding?	yes/no
		Was there a shift in how the issue was understood once the negotiations were underway?		
	Agenda Setting	How did the issue first come to the attention of the international community?	What did NGOs do to shape the agenda?	yes/no
		What specific items were placed on or taken off the negotiating agenda?		
		What were the terms of debate for specific agenda items?		
	Positions of Key Actors	What was the initial position of key actors?	What did NGOs do to shape the position of key actors?	yes/no
Did key actors change their position during the negotiations?				
Influence on Negotiating Outcome	Final Agreement/Procedural Issues	Does the agreement create new institutions to facilitate NGO participation in future decision making processes?	What did NGOs do to promote these procedural changes?	yes/no
		Does the agreement acknowledge the role of NGOs in implementation?		
	Final Agreement/Substantive Issues	Does the agreement reflect the NGO position about what should be done on the issue?	What did NGOs do to promote these substantive issues?	yes/no

Sumber: diolah oleh penulis melalui (Michele M. Betsill and Elisabeth Corell, "Analytical Framework: Assessing the Influence of NGO Diplomats", In *NGO Diplomacy: The Influence of Nongovernmental Organizations in International Environmental Negotiations*, 19-41 (Cambridge, Mass: MIT Press, 2008))

kategori, antara lain tinggi, moderat dan juga rendah.

¹⁸ Michele M. Betsill and Elisabeth Corell, "Analytical Framework: Assessing the Influence of NGO Diplomats", In *NGO Diplomacy: The Influence of Nongovernmental Organizations in International Environmental Negotiations*, 19-41 (Cambridge, Mass: MIT Press, 2008)

Kerangka Analisa ini memiliki lima indikator utama dalam menilai pengaruh sebuah organisasi non-pemerintah yang dibagi ke dalam dua kategori yaitu pengaruh organisasi non-pemerintah dalam proses negosiasi dan juga pengaruhnya menegosiasikan hasil akhir. Untuk menilai pengaruh di dalam proses negosiasi, terdapat tiga indikator yaitu *issue framing*, *agenda setting*, dan posisi dari aktor kunci. *Issue framing* yang dimaksud disini mengarah kepada bagaimana permasalahan tersebut terkonsep sebelum dan selama negosiasi. Aspek lain yang digunakan untuk menilai pengaruh negosiasi terhadap hasil akhir terdapat dua kategori yaitu isu prosedural dan isu substantif.

Indikator-indikator inilah yang kemudian menilai pengaruh suatu organisasi non-pemerintah yang dibagi kedalam tiga kategori yaitu rendah, moderat, dan tinggi. Pengaruh suatu organisasi akan disimpulkan sebagai rendah jika tidak memenuhi satupun indikator yang ada. Moderat jika memenuhi satu atau beberapa indikator pengaruh proses negosiasi namun tidak memenuhi satupun indikator pengaruh pada hasil akhir. Terakhir, dikategorikan tinggi jika memenuhi beberapa atau seluruh indikator proses negosiasi dan memenuhi semua atau salah satu indikator pengaruh pada hasil akhir.

1.6. Metodologi Penelitian

1.6.1. Metode Penelitian

Dalam penelitian ini, digunakan metode penelitian kualitatif. Proses penelitian kualitatif ini dilakukan secara induktif, dengan mencari kesimpulan

ataupun arti dari data yang telah dikumpulkan.¹⁹ Metode ini menekankan kepada pentingnya pemahaman arti dari perbuatan manusia yang bertemu dengan aspek-aspek seperti sosial, politik, dan budaya yang termasuk ke dalam proses interaksi. Metode ini bertumpu pada teori sebagai referensi dalam membuktikan urgensi dari tujuan penelitian.

1.6.2. Jenis Penelitian

Penelitian yang dilakukan dalam hal ini bersifat deskriptif, dimana digunakan sumber-sumber seperti buku, jurnal, artikel dan juga dokumen resmi lainnya seperti dokumen pemerintah yang dapat mendukung proses penelitian. Sumber yang digunakan dapat berbentuk fisik maupun digital, tergantung kepada ketersediaan data yang ada. Dalam penelitian ini, diutamakan penggunaan data primer yang berasal dari sumber resmi dari insititusi terkait.

1.6.3. Teknik Pengumpulan Data

Dalam melakukan penelitian ini, digunakan berbagai macam sumber data, seperti buku, artikel, jurnal, dokumen resmi, dan hasil wawancara melalui surat elektronik dengan perwakilan ICAN. Sumber ini dapat berbentuk digital maupun fisik yang digunakan sesuai dengan kebutuhan penelitian ini. Dalam penelitian ini, diupayakan penggunaan data primer yang diakses melalui institusi terkait.

1.7. Sistematika Pembahasan

Penelitian ini dibagi ke dalam lima bab, dimana pada bab pertama, dijelaskan latar belakang perkembangan isu senjata nuklir sampai dengan terwujudnya

¹⁹ John W. Creswell. *Research Design: Qualitative, Quantitative, and Mixed Methods Approaches*. Second ed. Thousand Oaks, California, USA: SAGE Publications, 2003, 15-18 (Creswell 2003)

TPNW, serta mengidentifikasi masalah tersebut. Berikutnya dijelaskan teori atau konsep-konsep yang digunakan dalam penelitian ini yang kemudian dikaitkan dengan permasalahan yang ada.

Pada bab dua, diperdalam pembahasan sejarah perkembangan perjanjian pelarangan senjata nuklir sampai dengan terwujudnya TPNW. Pembahasan dimulai dari latar belakang NPT sebagai perjanjian pelarangan penyebaran senjata nuklir yang nantinya berkorelasi dengan terwujudnya TPNW. Selain itu, dilanjutkan pembahasan pada latar belakang terjuwudnya TPNW secara mendalam dimana dijelaskan bagaimana perjanjian tersebut terjuwud dimulai dari proses pembuatannya sampai dengan aktor-aktor yang terlibat dimana difokuskan kepada pemerintah dan juga organisasi non-pemerintah.

Pada bab tiga, dipaparkan ICAN sebagai sebuah organisasi dan juga hubungannya dengan Perserikatan Bangsa-Bangsa, yang kemudian dikaitkan dengan terwujudnya TPNW. Pada bab ini juga dijelaskan relasi ICAN dengan organisasi non-pemerintah mitra ICAN yang ikut terlibat dalam berbagai upaya ICAN dan berhasil membantu mewujudkan TPNW dan juga bagaimana ICAN menerima penghargaan nobel perdamaian.

Pada bab empat, dilakukan analisis kasus. Analisis yang dilakukan berfokus kepada kerangka analisis yang ada, dengan membagi pembahasan berdasarkan indikator yang telah disediakan oleh kerangka analisis tersebut. Dalam analisis ini, teori dan konsep yang lain membantu dalam memperluas cakupan pembahasan upaya ICAN.

Pada bab lima, diberikan kesimpulan hasil penelitian yang telah dibuat dan juga menjawab pertanyaan penelitian yang ada. Kesimpulan yang diberikan tidak hanya terbatas kepada kerangka analisis yang ada namun juga ditambahkan penilaian berdasarkan konsep dan teori lainnya untuk memperkuat penilaian pengaruh yang telah diberikan oleh ICAN.